

SOFT POWER INGGRIS DALAM MENDUKUNG GLOBAL BRITAIN

Thania Kharisma Diputri¹

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Abstrak

Keputusan untuk keluar dari Uni Eropa atau Brexit membuat Inggris kehilangan keuntungannya sebagai anggota Uni Eropa. Keluar dari pasar tunggal Uni Eropa, pemberhentian *Free Movement*, perubahan kebijakan bagi pengunjung dan tenaga kerja asing serta dianggap akan menjadi negara yang terisolasi membuat Inggris untuk mengatasi hal tersebut. Inggris kemudian merespons hal tersebut dengan mengeluarkan visi *Global Britain* yang berfokus memanfaatkan keunggulan *soft power* Inggris. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana *soft power* Inggris dapat mendukung *Global Britain* dengan menggunakan teori *soft power* dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, *soft power* yang dimiliki oleh Inggris memiliki peran yang penting dalam terjalannya *Global Britain*. Inggris memulainya dengan ikut bergabung dengan perjanjian kerja sama ekonomi terbesar di dunia, yaitu CPTPP. Selain itu, Inggris juga memperbarui skema visa serta aktif dalam mendukung dan mempromosikan nilai-nilai seperti demokrasi dan hak asasi manusia di forum internasional. Tidak hanya itu, pemanfaatan *soft power* sebagai salah satu pilar penting *Global Britain* juga dapat membuat pertumbuhan bagi perekonomian walaupun secara perlahan, meningkatkan arus masuk tenaga kerja asing hingga daya tarik Inggris semakin terlihat menarik di mata internasional.

Kata Kunci: Inggris, Brexit, *Soft power*, *Global Britain*

Abstract

The decision to leave the European Union—or Brexit—has caused the United Kingdom to lose the benefits it enjoyed as a member of the European Union. With its exit from the European Union's single market, the end of free movement, changes in policies regarding visitors and foreign workers, and the perception that it will become an isolated nation, the United Kingdom must address these challenges. The United Kingdom subsequently responded by unveiling the "Global Britain" vision, which focuses on leveraging the country's soft power advantages. The objective of this study is to determine how the UK's soft power can support "Global Britain" by applying soft power theory and employing a descriptive qualitative methodology. Based on the research findings, the soft power possessed by the UK plays a crucial role in the implementation of the "Global Britain" vision. The UK began by joining the world's largest economic cooperation agreement, the CPTPP. In addition, the UK has also updated its visa scheme and is actively supporting and promoting values such as democracy and human rights in international forums. Furthermore, the utilization of soft power as one of the key pillars of Global Britain can also drive economic growth even though slowly, increase the inflow of foreign workers, and make the UK appear increasingly attractive in the eyes of the international community.

Keywords: United Kingdom, Brexit, *Soft power*, *Global Britain*

1. PENDAHULUAN

Inggris merupakan salah satu negara di Eropa dengan sejarah panjang dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya yang menempatkannya sebagai salah satu kekuatan dunia sejak masa kolonial hingga pasca Perang Dunia Kedua. Sejak

bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa pada tahun 1973 dan resmi menjadi anggota Uni Eropa pada 1976, Inggris memperoleh berbagai keuntungan, terutama melalui akses pasar tunggal Uni Eropa. Namun, pada Juni 2016 Inggris menyelenggarakan referendum keanggotaan Uni Eropa yang dimenangkan oleh opsi keluar (*leave*) dengan perolehan total suara 51,9% (Uberoi, 2016). Keputusan referendum tersebut dikenal sebagai Brexit. Setelah melaksanakan referendum, Inggris tidak langsung keluar dari Uni Eropa, namun harus melewati dulu pertemuan dengan para anggota Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan. Setelah pertemuan dengan anggota Uni Eropa selesai, Inggris secara resmi keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020 setelah melalui proses negosiasi dan penundaan berkali-kali. Setelah resmi keluar, Inggris kemudian masuk ke masa transisi hingga 31 Desember 2020.

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa membawa sejumlah konsekuensi, di antaranya terhambatnya arus perdagangan akibat keluarnya Inggris dari pasar tunggal, melambatnya pertumbuhan investasi asing, serta perubahan kebijakan imigrasi setelah dihentikannya kebijakan *free movement*. Terdapat dampak yang disebabkan oleh Brexit seperti perekonomian Inggris yang melambat sejak krisis keuangan 2008 menjadi semakin tertekan pasca referendum Brexit (Portes, 2022; Johnson & Mitchell, 2017), penerapan sistem imigrasi baru yang berbasis poin menyebabkan penurunan arus tenaga kerja asing yang berdampak pada berbagai sektor strategis, mulai dari kesehatan, pertanian, hingga pariwisata (Mayhew, 2022). Kondisi tersebut juga memunculkan kekhawatiran bahwa Inggris akan kehilangan pengaruh globalnya dan berisiko menjadi negara yang terisolasi secara internasional (Oppermann dkk., 2020).

Pasca Brexit, pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Boris Johnson memperkenalkan *Global Britain* sebagai acuan kebijakan luar negeri dan keamanan Inggris pasca Brexit. Gagasan ini pertama kali disampaikan oleh Perdana Menteri Theresa May pada 2016 dan kemudian dipertegas melalui dokumen resmi *Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy* pada Maret 2021. Dalam dokumen tersebut, Inggris menyatakan komitmennya untuk menjadi negara yang terbuka dan inklusif. Selain itu, dalam dokumen tersebut Inggris menekankan pentingnya untuk berperan aktif dalam diplomasi. “a *soft power* superpower”, yaitu memanfaatkan kekuatan non-koersifnya untuk mempertahankan pengaruh dan daya tarik di kancah internasional. Menurut

Malhotra dan Pilot, pemfokusan Inggris terhadap *soft power* karena adanya kesenjangan antara Inggris dengan ekonomi dunia (Malhotra & Pilot, 2024).

Kemampuan *soft power* Inggris tercermin dari konsistensinya menempati posisi tiga besar dunia dalam berbagai indeks penilaian *soft power*. Modal *soft power* tersebut bersumber dari penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, keberadaan universitas ternama seperti Oxford dan Cambridge, industri kreatif dan budaya populer, ajang olahraga seperti Premier League dan Wimbledon, lembaga penyiaran BBC World Service, lembaga kebudayaan British Council, serta jaringan diplomatik yang luas seperti *Commonwealth of Nations*.

Berdasarkan uraian, Inggris berharap bahwa setelah Brexit Inggris akan tetap menjadi negara yang memiliki posisi dan berperan penting di global. Namun kenyataannya, harapan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana setelah Brexit, Inggris dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti ketidakpastian perekonomian, kondisi geopolitik yang semakin kompetitif, arus tenaga kerja asing menurun hingga perubahan persepsi dari global.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual, sistematis, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, yaitu pemanfaatan *soft power* Inggris dalam mendukung *Global Britain* pasca Brexit. Sumber data dari penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, publikasi akademik, laporan tahunan lembaga, serta artikel ilmiah yang relevan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mendeskripsikan data dari berbagai dokumen dan literatur.

Teori Soft Power

Power sering kali diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Menurut Joseph Nye, *power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku lawan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan (Nye, 2003). Nye menjelaskan bahwa sebuah *power* dapat disalurkan melalui sumber daya yang bersifat nyata maupun tidak nyata karena orang-orang akan memperhatikan sumber daya tersebut. Power sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu

hard power (kekuatan melalui militer), *soft power* (kekuatan melalui budaya atau non-militer), dan *smart power* (kombinasi dari *hard* dan *soft power*). Di era modern, *hard power* kekuatan militer tidak lagi menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan nasional, terutama ketika menghadapi tantangan non-tradisional seperti perubahan iklim, pandemi serta krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, *soft power* menjadi relevan dan sering kali lebih mampu untuk membangun kerja sama dan dukungan internasional.

Menurut Nye dalam bukunya menuliskan *soft power* sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan melalui daya tarik daripada paksaan atau pembayaran. *Soft power* sendiri muncul karena adanya daya tarik atau *attraction* yang dihasilkan dari budaya, nilai politik dan kebijakan luar negeri suatu negara. Untuk menghasilkan *attraction* pada *soft power*, terdapat tiga sumber daya yaitu budaya (menunjukkan keindahan suatu negara), nilai politik (dianut oleh negara secara domestik dan internasional) dan kebijakan luar negeri (menunjukkan legitimasi dan otoritas moral).

3. PEMBAHASAN

Referendum Brexit di tahun 2016 memberikan tantangan bagi Inggris di domestik maupun internasional seperti berupa hambatan perdagangan, serta berkurangnya tenaga kerja asing dan pelajar internasional akibat kebijakan imigrasi baru (Du dkk., 2025; Chu & Kovacevic, 2025). Dampak ini turut melemahkan daya tarik Inggris sebagai tujuan investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Khan, 2023). Selain itu, sektor penting seperti pelayanan di restoran dan hotel, pertanian, pelayanan transportasi publik, logistik serta pariwisata yang sebelumnya menjadi pilar ekonomi juga mengalami penurunan akibat pemberhentian *Free Movement* dan terjadinya pandemi Covid-19 yang menambah beban ekonomi dan reputasi internasional Inggris.

Sebagai respons, pemerintah meluncurkan narasi *Global Britain* untuk membangun kembali identitas pasca Brexit. Narasi ini berfungsi sebagai strategi komunikasi politik sekaligus instrumen *soft power* yang menekankan keterlibatan aktif Inggris dalam diplomasi, perdagangan bebas, dan isu global. Dokumen *Global Britain in a Competitive Age* (2021) menegaskan komitmen Inggris untuk tetap menjadi “a soft

power superpower” dengan memanfaatkan sumber *soft power* yang dimiliki dan jaringan diplomatik (MacDonald, 2021).

Bergabung dengan *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP)

Pasca Brexit, Inggris kehilangan akses terhadap pasar tunggal dengan Uni Eropa yang mana hal tersebut memberikan dampak pada penurunan nilai ekspor Inggris hingga 30% di tahun 2020 (Chu & Kovacevic, 2025). Oleh karena itu, sebagai langkah awal setelah Brexit, Inggris memperluas jangkauan ekonominya di luar Uni Eropa dengan mendaftarkan diri secara resmi serta menandatangani protokol keanggotaan *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) pada Juli 2023 dan menjadi anggota penuh pada Desember 2024, sekaligus menjadi negara Eropa pertama yang bergabung dengan blok perdagangan tersebut. Keanggotaan Inggris di CPTPP ini membuka akses pasar baru, memperkuat posisi Inggris dalam rantai pasok global, dan memberi peluang investasi baru (Larbalestier dkk., 2023). Lebih dari sekadar kalkulasi ekonomi, keputusan ini merupakan instrumen *soft power* untuk membangun daya tarik dan legitimasi Inggris melalui jalur non-koersif atau tanpa paksaan, sekaligus menegaskan bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa tidak menjadikannya terisolasi, melainkan membuka ruang kerja sama baru yang lebih luas (Garcia, 2024).

Melakukan pembaruan skema visa untuk menarik tenaga kerja asing

Keputusan Inggris untuk Brexit dan memberhentikan kebijakan *Free Movement* menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat global. Pemerintah Inggris kemudian meluncurkan *Refreshed GREAT Britain Campaign*. Kampanye ini dijalankan dengan melalui berbagai program, seperti “*GREAT Study in UK*”, *Visit Britain*”, *GREAT Talent*”, dan “*UK Trade and Investment (UKTI)*” (Inggris, Cabinet Office, 2021). Pada program kampanye tersebut Inggris tidak hanya membentuk program untuk menarik wisatawan, tetapi juga untuk menarik tenaga kerja ahli asing untuk datang dan bekerja di Inggris dengan dibentuknya skema visa khusus seperti *Global Talent*, *Skilled Worker Visa*, *Health and Care Worker Visa* dan *Graduate Visa*. Melalui skema visa khusus tersebut, Inggris berhasil meningkatkan jumlah tenaga kerja asing 2,5 kali lebih banyak di bandingkan saat sebelum pandemi terjadi pada tahun 2019 (Inggris. Cabinet Office, 2024). Dengan melalui *Global Britain* dan pembaruan GREAT Britain

Campaign, Inggris berupaya untuk memperkuat *soft power*nya seperti budaya melalui pekerja asing yang dapat memperkuat narasi positif Inggris sebagai negara yang terbuka, multikultural, kompetitif dan inovatif.

Memprioritaskan hak asasi manusia, demokrasi dan kebebasan di dalam forum internasional

Inggris secara konsisten memprioritaskan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negerinya, sebagaimana tercantum dalam *Human Rights Act 1998* dan *Human Rights and Democracy Report* (Inggris, Foreign, Commonwealth & Development Office, 2022). Upaya ini diwujudkan salah satunya dengan melalui pendirian *UK Freedom of Religion or Belief Forum*, pendanaan bagi perlindungan jurnalis melalui UNESCO, dukungan terhadap *Human Rights Council* PBB terkait situasi HAM di Myanmar, Sudan, Ethiopia, dan Afghanistan, hingga memberi dukungan dan sponsor dalam pembentukan *International Commission on Human Rights Experts* di Ethiopia. Komitmen ini menegaskan peran Inggris sebagai “*force for good*” sebagaimana dinyatakan dalam *Integrated Review 2021*, sekaligus menjadikan HAM sebagai instrumen legitimasi moral yang mendukung *Global Britain*. Sejalan dengan itu, Inggris juga menjadikan demokrasi sebagai identitas nasional sekaligus nilai moral yang mendasari kebijakan luar negerinya, tercermin dari kepemimpinan pada Presidensi G7, partisipasi dalam *US Summit for Democracy*, penandatanganan *Open Societies Statement* bersama negara-negara mitra, serta kerja sama dengan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD) dan *Open Government Partnership* (OGP) dalam mendukung demokrasi dan pemerintahan terbuka di berbagai negara, termasuk penyusunan Kenya National Action Plan 2020–2022 (WFD, 2022).

4. KESIMPULAN

Brexit membawa Inggris pada berbagai tantangan, mulai dari terhambatnya arus perdagangan, menurunnya tenaga kerja dan wisatawan asing, hingga melemahnya kepercayaan internasional. Sebagai respons, pemerintah Inggris meluncurkan visi *Global Britain* yang menempatkan *soft power* sebagai fondasi utama untuk mempertahankan pengaruh globalnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Inggris memanfaatkan *soft power* melalui empat upaya utama: bergabung dengan CPTPP untuk memperluas jaringan ekonomi di luar Eropa, memperbarui skema visa khusus bagi tenaga kerja asing, serta secara konsisten memperjuangkan dan

mempromosikan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi di forum internasional. Keempat upaya tersebut selaras dengan tiga sumber *soft power* Nye, yaitu budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri, dan terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya tarik internasional, serta penguatan legitimasi Inggris sebagai negara yang aktif dan berpengaruh pasca Brexit.

Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak lepas dari tantangan seperti pemotongan anggaran lembaga budaya, dampak pandemi Covid-19, persaingan *soft power* global yang semakin ketat, dan pandangan skeptis terhadap *Global Britain* sebagai sekadar slogan retorik. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah Inggris terus memperkuat pendanaan bagi instrumen *soft power*-nya, khususnya lembaga seperti British Council dan BBC World Service, serta memperluas jaringan diplomasi dan kemitraan internasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas jangka panjang *soft power* Inggris pada kawasan atau negara mitra tertentu, seperti Asia Tenggara atau Amerika Serikat, guna memperkaya pemahaman mengenai keberlanjutan strategi *Global Britain* di masa mendatang.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

- Chu, B., & Kovacevic, T. (2025, 30 Januari). Five key impacts of Brexit five years on. *BBC*. <https://www.bbc.com/news/articles/cdrynjz1glpo>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Du, J., Shepotylo, O., & Yuan, X. (2025). How Did the Brexit Uncertainty Impact Services Exports of UK firms? *Journal of International Business Policy*, 8(1), 80–104. Springer. <https://doi.org/10.1057/s42214-024-00202-6>
- Garcia, M. (2024). Transcending Geography: The United Kingdom's Accession to the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership. *Geopolitics*, 31(1), pp.113–136. <https://doi.org/10.1080/14650045.2024.2411339>
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. PT. Bumi Aksara.
- Independent Commission for Aid Impact (ICAI). (2023). *The UK's approach to democracy and human rights: A review*. Independent Commission for Aid Impact. <https://icai.independent.gov.uk/review/the-uks-approach-to-democracy-and-human-rights/>
- Inggris. Cabinet Office. (2021). *The Integrated Review 2021*. <https://www.gov.uk/government/collections/the-integrated-review-2021>

Inggris. Cabinet Office. (2021). *Global Britain in a Competitive Age, the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy*. <https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy>

Inggris. Cabinet Office. (2021). *Refreshed GREAT Campaign Launched in 145 Countries*. <https://www.gov.uk/government/news/refreshed-great-campaign-launched-in-145-countries#:~:text=The%20revitalised%20campaign%20will%20reach,budget%20of%20%C2%A360%20million>

Inggris. Department of Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). (2022). *Human rights and democracy: The 2021 Foreign, Commonwealth & Development Office report*. <https://www.gov.uk/government/publications/human-rights-and-democracy-report-2021>

Khan, E. U. (2023). The Post-Brexit Paradigm: Investigating the Effects of Foreign Direct Investment on Economic Growth in the United Kingdom. *Archives of the Social Sciences: A Journal of Collaborative Memory* 2023, 2(1), pp. 94-110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8151602>

MacDonald, A. (2021, Maret). *Global Britain in a competitive age*. <https://www.britishcouncil.org/research-insight/global-britain-competitive-age>

Malhotra, S., & Pilot, A. (2024, 10 September). *The UK: Still a soft power superpower?*. Observer Research Foundation. <https://www.orfonline.org/expert-speak/the-uk-still-a-soft-power-superpower>

Mayhew, K. (2022). Brexit and UK higher education. *Oxford Review of Economic Policy*, 38(1), 179-187. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grab043>

Mohan, M. (2025). BETWEEN SOVEREIGNTY AND SOFT POWER: THE UK'S INTERNATIONAL IDENTITY AFTER BREXIT. *Journal of Political Science (JPS)*, 1(4), 2025. <https://airccse.com/JPS/papers/1425jps05.pdf>

Oppermann, K., Beasley, R., & Kaarbo, J. (2019). British foreign policy after Brexit: Losing Europe and finding a role. *International Relations*, 34(2), 133-156. <https://doi.org/10.1177/0047117819864421>

Portes, J. (2022, 25 Januari). Immigration and the UK economy after Brexit. *Oxford Review of Economic Policy*, 38(1), 82–96. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grab045>

Stojanovic, A., & Tetlow, G. (2018, 17 Oktober). Understanding the economic impact of Brexit. Understanding the economic impact of Brexit. *Institute for Government*. <https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/report/understanding-economic-impact-brexit>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi ke-3*. Bandung: ALFABETA, CV.

Uberoi, E. (2016). Analysis of the EU Referendum results 2016. *House of Commons Library*. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7639/>

UK *Soft power* Group. (2023). The Future of UK Soft power: Building a Strategic Framework. <https://www.uksoftpowergroup.com/strategic-framework>

Wraight, T., & Green, K., R. (2025). Global Britain versus Little England? National Identity and the future of the British Right. *The Political Quarterly*, 96 (2), 356-363. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13482>